

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abu Samah, *Hukum Pemda dan Otonomi Daerah*, Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2019.
- Al. Wisnubroto, Cesar A. Munthe, *Hukum Acara Pidana Sistem, Regulasi, dan Praktik.*, Suluh Media 2022, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Andi, H. (1986). Kamus Hukum. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Asis, A., & Sofyan, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana*.
- Faisal Salam, *Op.Cit*.
- Haharap, Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika. Jakarta*.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*.
- Husein, H. M. (1991). *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal TerpenLng dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta, 2003.
- Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Aditama Pustaka, Jakarta, 2015.
- Petter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum: Edisi revisi*, JakKencana prenada mdia group, Jakarta, 2005 hlm.
- RoeslanSaleh, *Loc. Cit*. hlm.
- Sabuan, A., Pettanasse, S., & Achmad, R. (1990). *Hukum acara pidana*. Angkasa.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: *Politenia*
- WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:tanpapenerbit,1998.

JURNAL :

- Alfajri, A. I. *Penetapan Biaya Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 10/PDT. G/2019/PA. KDS)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). (2021)
- Alqin, Zahrefi. *Perampasan Aset Pihak Ketiga Tindak Pidana Kehutanan Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Negara*. Diss. Hukum Pidana, 2023.
- Djapai, M. P. *Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHP. Lex Crimen*, 6(7). (2017)
- Fatin, F., & Din, M. (2021). PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PERKARA JARIMAH MAISIR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum RUPBASAN Klas I Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(3), hlm. 407-408.
- Hansen, Seng. "Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi." *Jurnal Teknik Sipil* 27.3 (2020): 283.
- Hattu, Tino YS, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. "Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.10 (2021): 1047-1061.
- ILHAM, SABRIALDI. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN (Studi di Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Indriana, Yayan. "Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi." *Cepalo* 2.2 (2018): 123-130.
- Jannahtul Azalia, Siti Raina. *sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor pada kejaksaan negeri gowa sulawesi selatan (Putusan Nomor 9/Pid. Sus-Anak/2023/PN Sgm)*. Diss. Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Johar, Olivia Anggie, and Mahfira Yana. "Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi." *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 2. No. 1. 2022.

- Juliana, Dicka. "Prosedur Penyitaan dan Pelelangan Barang-Barang Wajib Pajak dalam Tindakan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur." (2023).
- Juwitanto, J., Amiruddin, A., & Ufran, U. (2023). Tanggung Jawab Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Berada di Rupbasan Kelas I Mataram. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1105-1114.
- Kadir, Nugraha Abdul, and Chaerani Nufus. "Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dalam Proses Peradilan Pidana.
- Karindra, Leo Rahmat. "Proses Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9 (2022): 618-624.
- Khadafy, Rezky Noor, Marwan Mas, and Zulkifli Makkawaru. "Penanganan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3.2 (2021): 89-97.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, 2020, hlm. 22.
- Kurniyawan, A., & Hasanah, Y. N. (2020). Peran Rupbasan sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi. *Reformasi Hukum*, 24(1), 1-20.
- Lestari, R., Trisna, N., & Effida, D. Q. (2020). Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2).
- M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, 2019, "Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 3/No.1/ Juli/2019, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia, hlm.16.
- Mahmudyah, Arida. "Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan Yang Mengikuti Pemiliknya)." *Wasaka Hukum* 7.2 (2019): 331-348.
- Marpaung, Leden. "Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)." (2008).
- MUNIB, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

- Naomi, Dina. *perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas benda tidak bergerak akibat ahli fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020
- Nasional, B. P. H., Hukum, K., & RI, H. A. M. (2013). *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*. Jakarta: BPHN.
- Nasution, A. S. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 terhadap pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara dan rampasan negara di rubasan sitaan Klas I Jaksel* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nasution, Rishan Hanafi. *peran jaksa dalam mengeksekusi barang bukti yang disita untuk negara dan telah berkekuatan hukum tetap (studi di kejaksan negeri medan)*. diss. fakultas hukum, universitas islam sumatera utara, 2024.
- Novita, Dian. *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Oleh Lembaga Kejaksan (Studi Kasus Kejaksan Negeri Poso)*. Diss. UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO, 2021.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32.1 (2017): 17-36.
- Nuraini, Nuraini, and Olivia Nindy Kartika. "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksan Negeri Tanjung Jabung Timur." *Wajah Hukum* 8.1 (2024): 395-408.
- Nurhidayat, Willy Dwi, and S. H. Hartanto. *Implementasi Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh Rupbasan Atas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Study Kasus di Rupbasan Purbalingga)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Perdana, Almavico Putra. "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7.1 (2020): 222-228.
- Prawoko, Adtila, et al. "Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnyanya Dalam Hukum Acara Pidana." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.04 (2024): 206-216.
- Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 1, Januari-Juni 2020, Hal.1-20
- Rusyadi, I. "Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5.2 (2016): 128-134.

- Sani, atha khairunnisa. "skripsi implementasi perlindungan hak kepemilikan benda sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) kelas i jakarta timur." (2024).
- Sanusi, A., & Kav, J. R. S. (2018). Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Optimization of Administration of Items Confiscated by the State at the State's Warehouse of Confiscated Items). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12.
- Saputra, i. implementasi pasal 44 kuhap terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara pada rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) kelas 1 palembang.
- Setyadi, Sigit. "Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam Penegakan Hukum)." *Jurnal Kajian Hukum* 1.2 (2016): 205-224.
- SILALAH, G. P. *pertanggungjawaban kepala rupbasan atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di daerah istimewa yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY). 2018.
- SK, M. Fadhli Noval Tri. "kurang optimalnya fungsi rupbasan sebagai lembaga pengelola basan dan barang di indonesia." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.2 (2023): 356-367.
- Suswanto, Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1.1 (2018): 43-52.
- Syahnawala, Dona. *ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENGAMANAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAAN HASIL KEJAHATAN*. Diss. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA, 2024.
- Wahyuni, Tri. "Tinjauan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) Surakarta." (2008).
- Wenur, Fero Paren. "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sitaan Yang Hidup Dalam Fungsi Rupbasan Sebagai Tempat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.1 (2022).
- Wulandari, Eti. *Analisis yuridis kedudukan hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) terkait pemeliharaan benda sitaan sebagai alat bukti tindak pidana*. Diss. Universitas Merdeka Pasuruan, 2023.

Yuliawantara, Denny. *Tanggung jawab yuridis rumah penyimpanan benda sitaan negara terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara*. Diss. Universitas Merdeka Pasuruan, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Presiden Republik Indonesia*, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>.

